

KETIKA AGAMA DAN MASYARAKAT DIGITAL MENJADI SENJATA BARU PROPAGANDA POLITIK

Asmaul Husna

Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Aceh

Safutra Rantona

Indonesian Communication Research

ABSTRACT

Nineteen months have passed, but the action of the political religious social movements which born post religious sacrilege case on Elections Jakarta turned out to be far from over. The movement originally was a step of consolidation in order to evoke the political consciousness of Muslims, now began to be infiltrated by other groups with particular interests. These interest groups considered to sharpen the conflict and cause the political noise never ended across this country. This article try to expose how the social-political issues played massif and structured in virtual spaces by interest groups in order to form the force and gained the power of politics. And how the relationship between religion, state, and people are pitted in order that the collective identity look sharper. So no wonder that the people of Indonesia now seems to have split in two major axis, Religious versus Nationalist.

Keywords: *Conflict, Digital Society, Propaganda. Religious Political Movement.*

ABSTRAK

Sembilan belas bulan telah berlalu, namun aksi dari gerakan sosial politik religius yang lahir pasca kasus penistaan agama pada Pilkada DKI Jakarta ternyata belumlah usai. Gerakan yang semula merupakan sebuah

langkah konsolidasi guna membangkitkan kesadaran politik umat islam, kini mulai ditunggangi oleh kelompok lain dengan kepentingan tertentu. Kelompok kepentingan inilah yang ditengarai memperkeruh konflik dan menyebabkan kegaduhan politik tak kunjung usai di seantero negeri. Artikel ini mencoba memaparkan bagaimana isu-isu sosial politik kemudian dimainkan secara massif dan terstruktur dalam ruang-ruang virtual oleh kelompok kepentingan guna membentuk kekuatan politik dan demi meraih kekuasaan. Serta bagaimana relasi antara agama, rakyat, dan negara dibenturkan agar identitas kolektif terlihat lebih tajam. Maka tak heran jika kini rakyat Indonesia seolah telah terpropaganda dan terbelah dalam dua poros besar, Agamis dan Nasionalis.

Kata kunci: *Gerakan Sosial Politik Religius, Konflik, Masyarakat Digital, Propaganda.*

Pendahuluan

Perkembangan era digital dewasa ini kian membuat masyarakat menjadi adiktif terhadap media sosial. Ratusan bahkan ribuan *comment* yang bertebaran di laman-laman digital tersebut seolah menggambarkan euforia keingintahuan masyarakat akan informasi yang terjadi di sekelilingnya. Di tengah setiap orang memiliki kebutuhan informasi yang tinggi dalam menjalani kehidupan, media sosialpun tampil layaknya etalase politik. Melalui media sosial, publik dapat mengetahui dan mengevaluasi setiap langkah dan gerak-gerik para elit politik di dalamnya. Tak pelak, media sosialpun seolah bertransformasi menjadi sebuah tren di seluruh penjuru negeri.

Karakteristik media sosial yang cenderung mudah diakses, interaktif, dan tanpa batas ternyata juga menyimpan persoalan tersendiri. Beberapa kelompok kepentingan bahkan dengan sengaja memanfaatkan ruang virtual ini sebagai sarana memicu konflik (Risman, 2015). Konflik dalam dunia digital sejatinya dapat di klasifikasikan ke dalam dua bentuk, yakni konflik horizontal dan konflik vertikal. Pertama, konflik horizontal. Konflik ini mengacu pada konflik yang terjadi antara dua atau lebih kelompok budaya atau agama yang berbeda. Konflik kedua, konflik vertikal mengacu pada konflik yang terjadi antara pemerintah dengan kelompok bu-

daya atau agama tertentu (Sukma, 2005: 3). Dan asumsi teori ini, tentu sangatlah relevan apabila kita kaitkan dengan kondisi sosial politik yang tengah terjadi di Indonesia.

Konflik horizontal di Indonesia sendiri mulai terlihat sejak Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Konflik horizontal ini bahkan tidak hanya memantik pertikaian warga DKI Jakarta semata. Lebih dari itu, konflik ini kian meluas dan memaksa perselisihan yang lebih kompleks di antara masyarakat Indonesia. Konflik horizontal ini dalam observasi kami setidaknya dipicu oleh dua faktor utama. *Pertama*, kuantitas pemberitaan Pilgub DKI Jakarta yang mendominasi hampir seluruh pemberitaan di media massa dan sosial. Padahal pada waktu bersamaan, terdapat 7 provinsi, 18 kota, dan 76 Kabupaten yang lain yang juga melaksanakan Pilkada.

Intensitas pemberitaan tentang Pilgub DKI Jakarta yang terus mendominasi media massa dan sosial mulai terlihat sekitar bulan Oktober 2016. Komunikasi Indonesia Indicator mencatat bahwa selama November 2016, pemberitaan Pilkada dimuat sebanyak 52.773 dari 818 media berita *online*. Namun, porsi pemberitaan Pilkada DKI Jakarta mencapai 58%, dan sisanya merupakan pemberitaan di 100 daerah lain (Fahrudin, nasional.kompas.com, 2 Desember 2016). Data tersebut juga semakin diperkuat dengan hasil riset yang oleh Isentia terhadap media massa tradisional maupun media sosial (Prihadi, cnnindonesia.com, 27 Maret 2017), yang menyatakan bahwa terdapat 259.382 perbincangan di media sosial dan 7.165 artikel di media massa tradisional mengenai Pilgub DKI Jakarta.

Kedua, kualitas isi pemberitaan mengenai Pilgub DKI Jakarta yang tidak menerapkan prinsip jurnalisme damai dan rendahnya literasi media yang dimiliki oleh masyarakat dalam menggunakan media sosial untuk menyampaikan pendapatnya. Santosa (2017: 205) menjelaskan bahwa isi pemberitaan Pilkada ini menjadi kian “panas” karena salah satu calon gubernur yaitu Ahok dilaporkan oleh Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) terkait pernyataannya yang dianggap melecehkan agama Islam. Masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam pun tak tinggal diam. Mereka bahkan turut serta menyuarakan pendapatnya baik melalui media sosial serta aksi damai berjilid-jilid dengan turun ke jalan guna menuntut Ahok untuk segera diproses secara hukum. Di sisi lain, massa pro Ahok pun juga melakukan “perlawanan” dengan melakukan aksi serupa

dengan tema “Ahok dalam Berita Maya” (Judhita, 2017). Bahkan situs berita *online* VOA-Islam ikut memperkeruh suasana dengan menyajikan berita yang tidak berimbang dan bahkan sebagian besar bertendensi negatif serta memojokkan Ahok dengan tingginya persentasi jumlah berita yang bermuatan isu Suku, Agama, Ras, Antar golongan (SARA).

Eforia politik yang terdapat dalam kasus Pilgub DKI Jakarta menjadi sebuah bukti bahwa media sosial kini telah menjadi senjata baru dalam propaganda politik. Hal ini sesuai dengan perubahan bentuk komunikasi dari *mass communication* menjadi *mass self mobile communication*. Dimana pada era *mass communication*, masyarakat diasumsikan sebagai pihak yang pasif dalam menerima pesan politik yang disebar oleh para elite politik. Sedangkan *mass self mobile communication* memosisikan masyarakat sebagai khalayak aktif yang mampu menyatakan pandangan, pernyataan, serta sikap politik mereka secara bebas dan aktif melalui ruang-ruang virtual (Arifina, 2015).

Konflik dalam Pandangan Dahrendorf

Dahrendorf adalah salah seorang tokoh yang secara gamblang membedah mengenai teori konflik. Ia menganalogikan wewenang dan posisi sebagai poin sentral dalam teorinya. Pendistribusian kekuasaan dan wewenang yang tidak merata akan menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Dahrendorf menganalisis konflik dengan mengidentifikasi berbagai peranan dan kekuasaan dalam masyarakat. Dahrendorf mengatakan bahwa kekuasaan dan otoritas merupakan sumber-sumber yang menakutkan, karena mereka yang memegangnya memiliki kepentingan untuk mempertahankan *status quo*.

Dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang bertentangan, yaitu antara penguasa dan yang dikuasai. Pertentangan terjadi karena golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan *status quo*, sedangkan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan. Pertentangan kepentingan selalu ada disetiap waktu dalam setiap struktur. Dahrendorf melihat yang terlibat dalam konflik adalah kelompok semu (*quasai group*) yaitu para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama, terbentuk karena munculnya

kelompok kepentingan. Adapun kelompok kedua adalah kelompok kepentingan yang terdiri dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat.

Teori konflik Dahrendorf adalah mata rantai antara konflik dan perubahan sosial. Konflik memimpin ke arah perubahan dan pembangunan. Karena dalam situasi konflik golongan yang terlibat konflik melakukan tindakan perubahan dalam struktur sosial. Jika konfliknya hebat, maka yang terjadi adalah perubahan secara radikal. Bila konfliknya disertai kekerasan, maka perubahan struktur akan efektif. Dahrendorf melihat masyarakat selalu dalam kondisi konflik dengan mengabaikan norma-norma dan nilai yang berlaku umum yang menjamin terciptanya keseimbangan dalam masyarakat.

Dalam teorinya Dahrendorf melihat bahwasanya kepentingan yang dikaitkan dengan peran didefinisikan sebagai peran-peran yang diharapkan. Hal itu bukanlah kepentingan material. Peran yang dimaksud Dahrendorf berbeda dengan pengertian peran Lockwood dan Pengertian Marx. Jadi, setiap peran memiliki harapan yang bertentangan yang dikaitkan dengannya. Suatu peran yang mengundang kekuasaan membawa harapan bahwa kekuasaan itu dilaksanakan untuk keuntungan organisasi sebagai suatu keseluruhan dan dalam kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan. Dahrendorf menjelaskan apa yang terjadi sangat tergantung pada pilihan orang yang melakukan peran. Penjelasan Dahrendorf sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Weingart, yaitu tentang "voluntarisme" sesuatu ide bahwa keteraturan sosial, peraturan-peraturan dalam kehidupan sosial tergantung pada pilihan individu.

Dahrendorf melihat masyarakat berdimensi ganda, memiliki sisi konflik dan sekaligus sisi kerja sama, sehingga segala sesuatunya dapat dianalisis dengan fungsionalisme struktural dan dapat pula dengan konflik. Dahrendorf, dalam menjelaskan konflik berpindah dari struktur peran kepada tingkah laku peran. Tetapi, keduanya tidak bisa berjalan bersama-sama dalam bentuk hubungan sebab akibat, karena keduanya tidak dipisahkan secara jelas sebagai fenomena yang berbeda. Masing-masing tergantung pada yang lain tanpa melakukan penjelasan satu sama lain. Konteks didalam tulisan ini memberikan gambaran bahwa politik merupakan sikap

yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kekuasaan dan menikmati dengan menjual isu-isu agama. Media sosial memberikan jalan untuk membuat konflik secara struktur dan masif, sehingga perbedaan dapat menyebabkan konflik.

Asumsi yang mendasari teori sosial non-Marxian Dahrendorf antara lain : (1) manusia sebagai makhluk sosial mempunyai andil bagi terjadinya disintegritas dan perubahan sosial, (2) masyarakat selalu dalam keadaan konflik menuju proses perubahan. Masyarakat terintegrasi atas dasar dominiasi (borjuis) menguasai proletar. Konflik kelas ini disebabkan tidak adanya pemisah antara pemilikan serta pengendalian sarana-sarana produksi. Sedangkan fungsi konflik menurut Dahrendorf ialah sebagai berikut : (1) membantu memberikan suasana yang sedang kacau; (2) kutub penyelamat berfungsi sebagai jalan keluar yang meredakan permusuhan; (3) energi-energi agresif dalam konflik realitas (berasala dari kekecawaan, ketegangan), mungkin terakumulasi dalam proses interaksi lain sebelum ketegangan dalam situasi konflik diredakan; (4) konflik tidak selalu berakhir dengan rasa permusuhan; (5) konflik dapat dipakai sebagai indikator kekuatan dan stabilitas suatu hubungan; dan (6) konflik dengan berbagai *outgroup* dapat memperkuat kohesi internal suatu kelompok.

Masyarakat Digital dan Konflik Agama

Revolusi industri yang terjadi di Eropa abad 18an, menjadi cikal bakal perkembangan teknologi dan informasi dunia. Perkembangan ini pulalah yang kemudian melahirkan sekelompok masyarakat baru atau yang lebih dikenal dengan istilah masyarakat digital. Globalisasi informasi dewasa ini tidak dapat dipisahkan dari peran ruang-ruang komunikasi global di dalamnya, seperti *cyberspace*, yang mendiseminasi informasi dalam skala global. Informasi tentang sebuah sudut terpencil di Indonesia, lewat perkembangan teknologi pengintaian (*surveillance technology*) dapat diperoleh secara real time di Amerika, yang secara instant pula dapat diakses masyarakat luas, bila informasi itu disampaikan lewat televisi atau web-side pada jaringan internet.

Fenomena ‘globalisasi komunikasi’ seperti ini merupakan salah satu aspek dari apa yang disebut sebagai masyarakat terbuka (*open society*). George Soros, adalah tokoh yang sudah sejak lama mempersiapkan tesisnya tentang masyarakat terbuka global (*a*

global open society)—sebuah masyarakat global yang dilandasi oleh prinsip individualisme, liberalisme dan keterbukaan. Soros melihat, bahwa nilai-nilai globalisme lebih luhur dibandingkan nilai-nilai ‘nasionalisme’, disebabkan di dalamnya orang dapat berpikir mengenai ‘jaringan besar’. Kepentingan dan idealisme global lebih penting dibandingkan ‘kepentingan nasional’. Untuk itu, ia mengajukan sebuah agenda membangun *a global open society*, yang dilandasi oleh bentuk-bentuk ekonomi, sosial dan budaya yang terbuka.

Masyarakat secara sederhana bisa memahami sebagai interaksi antara hubungan individu dengan individu lainnya. Interaksi manusia tersebut menciptakan entitas yang menjadi ciri khas dalam bermasyarakat. Masyarakat digital merupakan masyarakat yang tak mempunyai pagar yang dapat membentengi semua orang bebas menggunakannya sesuai dengan kepentingan masing-masing. Zaman yang sangat rawan akan konflik membuat masyarakat digital penuh oleh isu-isu yang negative, sehingga membuat agama tertentu pun menjadi memanas.

Menurut Kornblurn (dalam Risman, 2015: 393), konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial politik. Konflik merupakan bentuk kekerasan yang ditimbulkan oleh interaksi sosial dari eforia digital dalam masyarakat plural di Indonesia. Indonesia sangat terpengaruh dengan isu-isu agama, justru membuat buruk keadaan ekonomi, stabilitas keamanan dan roda pemerintahan. Dari konsep tersebut, dapat menjadi penyelesaian konflik agama dari eforia masyarakat digital sekarang.

Dari kasus pilgub DKI Jakarta kita mendapatkan fenomena konflik horizontal secara langsung dicetuskan dan disebarakan melalui ruang digital. Konflik yang diwarnai dengan isu agama menjadi catatan buruk dalam sejarah demokrasi negeri ini. Tidak jarang untuk menarik simpati masyarakat, beberapa kelompok pendukung menjadikan isu agama untuk menyerang kelompok lainnya. Misalnya saja, video kampanye Ahok dan Djarot Saiful Hidayat yang dilaporkan kepada Banwaslu karena menyudutkan umat Islam. Video tersebut dianggap menyudutkan umat Islam karena menimbulkan kesan bahwa umat Islam adalah pembuat keonaran (Rizky, news.okezone.com, 10 April 2017).

Setidaknya ada empat paradigma komunikasi yang dapat

kita gunakan dalam upaya esolusi konflik yakni paradigma *encoding-decoding*, *intensionalis*, *perspective taking* dan dialogis (Krauss,2000: 145-154). Jika dikaitkan dengan kasus konflik sosial politik agama yang terjadi di Indonesia, maka paradigma yang sesuai adalah intensionalis. Karena dalam paradigam intensionalis, baik komunikan maupun komunikator harus berusaha memahami apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh si pembuat pesan. Selain itu, dalam pembuatan pesan, seorang komunikator harus mempertimbangkan apa dampak kata-katanya itu kepada orang lain.

Kepentingan, Kekuasaan, Politik

Kelompok kepentingan adalah sekelompok manusia yang mengadakan persekutuan yang didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan ini dapat berupa kepentingan umum atau masyarakat luas ataupun kepentingan untuk kelompok tertentu (dalam Budiardjo;2008). Adapun dalam kasus Pilgub DKI Jakarta, kelompok-kelompok kepentingan ini adalah mereka yang bermain di ranah konflik membuat kegaduhan antar etnis dan antar agama hingga saling berseteru. Mengingat Republik Indonesia merupakan negara yang mempunyai mayoritas penduduk islam terbanyak di dunia, situasi inilah yang kemudian sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan kekuatan ekonomi dan kekuatan politik.

Konflik diartikan sebagai “perselisihan dan pertentangan yang tajam, sebagai kepentingan, ide dan lain sebagainya” dan melibatkan “perbedaan yang dirasakan dari kepentingan, atau keyakinan bahwa saat ini aspirasi pihak tidak dapat dicapai secara bersamaan” (dari Pruitt dan Rubin. 1986:4). Konflik dihasilkan dari “interaksi orang-orang yang saling ketergantungan dan menerima tujuan yang bertentangan dan gangguan satu sama lain dalam mencapai tujuan tersebut (Hocker dan Wilmot.1985).

Kehadiran konflik yang dilakukan oleh kelompok dan organisasi hanya untuk mendapatkan kekuasaan, kepentingan dan politik. Ironisnya mereka menggunakan symbol-simbol keagamaan dalam politik masih menjadi syarat-syarat demokrasi di Indonesia. Beberapa realitas pergesekan politik di Indonesia, membuat persepsi dan perbedaan pandangan menjadi labelling untuk oknum tertentu. Maka ada sebutan partai islam dan non-islam. Sedangkan

perilaku dan ideologi partai tidak menjadi *Image* partai tersebut, melainkan untuk mendapatkan dukungan. Pilgub DKI Jakarta dapat kita lihat bahwa isi pesan yang sering disampaikan adalah Cagub Islam dan non islam. Karena isi pesan ini sangat mudah menjadi isu-isu konflik dan membuat perpecahan ditengah-tengah masyarakat. Pergesekan politik yang bermuatan sentimen memuncak di Pilgub DKI Jakarta (Herdianshah, 2017: 62).

Kasus lain yaitu misalnya pada kasus teror yang dialami oleh dr. Fiera Lovita setelah mengungkapkan pendapat dan sikapnya di *facebook* mengenai tokoh organisasi Islam di Indonesia yang kabur saat akan dimintai keterangan terkait chat mesum. Ada juga video yang viral di media sosial mengenai seorang remaja yang diintimidasi oleh sekelompok orang karena dianggap telah menghina Pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Syihab. Menurut Herdianshah (2017: 62), permasalahan kasus dugaan penistaan Islam oleh Ahok menggulirkan efek bola salju politik yang bisa mengancam keamanan nasional. Dewasa ini, agama menjadi isu yang sangat sensitif untuk diperbincangkan di ruang digital. Bahkan kini seolah rakyat Indonesia telah kian terpropaganda dan terbelah dalam dua poros besar, Agamis dan Nasionalis.

Kesimpulan

Fenomena masyarakat digital dan media sosial menjadi senjata propaganda politik terjadi karena masyarakat Indonesia belum terbiasa membicarakan isu-isu sensitif seperti perbedaan agama, perbendaan pandangan dan perbedaan politik di ruang-ruang publik. Ketika agama digunakan untuk propaganda politik maka terjadilah konflik dunia maya dan membuat kegaduhan dan keamanan di seantero negeri. Kegagalan dalam upaya penyelesaian konflik horizontal justru semakin memperkeruh suasana dan menjadikan masyarakat saling menyerang satu sama lain dengan cara *labelling* dan mengunggah ujaran kebencian.

Masyarakat digital perlu melakukan penyaringan informasi secara benar dan hati-hati. Isu di dunia digital dapat membuat peperangan di dunia cyber. Sudah seharusnya pemerintah untuk mengawasi dan memberikan peringatan kepada pengguna media sosial didalam berpolitik. Peran pemerintah sangat diharapkan dalam hal pendidikan politik kepada seluruh partai politik. Penggunaan media sosial dikawal ketat oleh pemerintah melalui

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan agar tidak ada lagi yang memperkeruh konflik horizontal yang sudah terjadi. Hal ini menjadi salah satu cara dalam mengelola dan mencegah terjadinya eskalasi konflik horizontal yang lebih luas. Pada sisi lain, perlu kesadaran semua pihak dalam menjaga persatuan republik ini. Karena Indonesia terlalu berharga jika harus hancur oleh kepentingan-kepentingan politik segelitir orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik-Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fachrudin, Fachri. (2016). Ini Alasan Pemberitaan Pilkada DKI Jakarta Mendominasi. Diakses di <http://nasional.kompas.com/read/2016/12/02/23151391/ini.alasan.pemberitaan.pilkada.dki.jakarta.mendominasi> pada tanggal 5 Juli 2018.
- Herdiansah, Ari Ganjar dan Junaidi dan Heni Ismiati. (2017). Pembelahan Ideologi, Kontestasi Pemilu dan Persepsi Ancaman Keamanan Nasional Spektrum Politik Indonesia Pasca 2014?. *Jurnal Wacana Politik* 2(01): 61-73
- Hocker, Wilmot. 1985. *Komunikasi Massa : Suatu Pengantar*. Bandung. Simbiosia Rekatama Media.
- Juditha, Christian. (2017). Sentimen dan Imparsialitas Isi Berita Tetang Ahok di Portal Berita Online. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembagunan* 18(01): 57-73.
- Krauss, Robert & Ezequiel Morsella. (2006). *The Hanbook of Conflict Resolution. Communication and Conflict* (144-157). San Fransisco: Jossey Bass.
- Prihadi, Susetyo Dwi. (2017). Ahok Paling Sering Dibicarakan di Media Sosial. Diakses dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170327103942-185-202952/ahok-paling-sering-dibicarakan-di-media-sosial/> pada tanggal 5 Juli 2018.
- Pruitt, D.G., & Rubin, J.Z. 1986. *Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement*. New York: Random House.
- Sukma, Rizal. (2005). *Ethnic Conflicts in Southeast Asia. Ethic Conflict In Indonesia Causes and the Quest for Solution* (1-41). Singapura: ISEAS Publication.
- Rahardjo, Turnomo. (2012). Literasi Media dan Kearifan Lokal Konsep & Aplikasi. *Memahami Literasi Media* (Perspekti Teoritis) (1-24). Mata Padi Presindo.
- Santosa, Bend Abidin. (2017). Peran Media Massa Dalam Mencegah Konflik. *Jurnal ASPIKOM* 3(2): 199-214.

Turner, Jonathan H. (1978). *The Structurer of Sosiology Theory*.
Homewood, Ill. The Dorsey Press.